



NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Myristica Imanita^{1*}, Yusuf Perdana², Rinaldo Adi Pratama³

^{1*}myristica.imanita@fkip.unila.ac.id, ²yusuf.perdana@fkip.unila.ac.id, ³rinaldo@fkip.unila.ac.id

Universitas Lampung¹⁻³

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Nahdlatul Ulama, pergerakan nasional, kolonialisme Belanda, strategi kultural, pesantren

Keywords:

Nahdlatul Ulama, national movement, Dutch colonialism, cultural strategy, pesantren



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Author.
Published by Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan sosial-politik pada masa pergerakan nasional di bawah kolonialisme Belanda. Didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya, NU lahir sebagai respons ulama tradisional terhadap dominasi kolonial, arus modernisasi Islam, dan penetrasi ideologi global. Berbeda dengan organisasi lain yang menempuh jalur konfrontatif, NU mengembangkan strategi kultural dan non-konfrontatif melalui konsolidasi pesantren, dakwah massal, pendidikan non-formal, serta kegiatan sosial-kultural. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer mencakup arsip surat kabar kolonial, dokumen organisasi, serta koleksi digital, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU tidak hanya menjaga tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah*,

tetapi juga berperan aktif dalam politik dengan mengajukan mosi, melakukan advokasi regulatif, serta bergabung dalam MIAI dan GAPI. Di daerah kolonisasi seperti Lampung, NU memanfaatkan migrasi Jawa untuk memperluas dakwah dan pendidikan. Dengan demikian, strategi kultural NU terbukti efektif memperkuat solidaritas umat, membangun kesadaran nasional, dan mempersiapkan masyarakat menuju kemerdekaan.

ABSTRACT

This study examines the role of Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-political force during the Indonesian national movement under Dutch colonial rule. Founded on January 31, 1926, in Surabaya, NU emerged as a response of traditionalist scholars to colonial domination, the wave of Islamic modernization, and the penetration of global ideologies. Unlike other organizations that adopted confrontational approaches, NU developed cultural and non-confrontational strategies through pesantren consolidation, mass religious propagation, non-formal education, and socio-cultural activities. This research employs the historical method consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources include colonial newspapers, organizational documents, and digital collections, while secondary sources consist of books, articles, and prior studies. The findings reveal that NU not only preserved the *Ahlussunnah wal Jama'ah* tradition but also played an active political role through motions in congresses, regulatory advocacy, and participation in MIAI and GAPI. In colonization areas such as Lampung, NU utilized Javanese migration as an opportunity to expand religious outreach and education. In conclusion, NU's cultural strategies effectively strengthened Muslim solidarity, fostered national consciousness, and prepared society for Indonesia's independence.

PENDAHULUAN

Awal abad ke-20 merupakan periode penuh dinamika bagi masyarakat Hindia Belanda. Berakhirnya sistem tanam paksa dan diterapkannya politik etis membuka ruang bagi

sebagian pribumi untuk mengakses pendidikan modern, namun pada saat yang sama struktur kolonial tetap melanggengkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik (Vickers, 2013; Ricklefs, 2008). Perubahan ini melahirkan kelompok terpelajar yang kemudian menjadi motor lahirnya organisasi pergerakan nasional dengan orientasi beragam, mulai dari pendidikan, keagamaan, hingga politik (Shiraishi, 1990).

Di sisi lain, penetrasi modernisasi dan kebijakan kolonial juga menimbulkan keresahan di kalangan ulama pesantren. Arus pembaruan Islam dari Timur Tengah, terutama setelah munculnya gerakan Wahabi pasca-1924 berhadapan dengan tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang telah lama mengakar di Nusantara (van Bruinessen, 1994; Feillard, 1999). Kondisi ini mendorong lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 di Surabaya sebagai wadah ulama tradisional untuk mempertahankan tradisi keagamaan sekaligus merespons tantangan kolonialisme dan modernisasi (Barton & Fealy, 1996).

Masa pergerakan nasional (1900–1942) ditandai dengan munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam, yang membawa semangat nasionalisme, pendidikan, dan perjuangan politik melawan kolonialisme Belanda. Dalam konteks itu, berdirilah NU pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Chasbullah. NU berperan mempertahankan tradisi pesantren sekaligus merespons arus modernisasi Islam global pasca-penaklukan Hijaz oleh aliran Wahabi tahun 1924 (Fahrudin, 2009; Sutarmo, 2005).

Sebagai organisasi sosial-keagamaan, NU memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam, baik melalui pendidikan, sosial, maupun politik. Kiprahnya pada masa pergerakan nasional terlihat dari aktivitas politik, pendirian lembaga pendidikan pesantren, hingga pemanfaatan pers sebagai alat perjuangan. Pers pada masa itu menjadi medium penting dalam menyebarkan informasi dan membangun opini publik. NU pun menggunakan pers sebagai instrumen politik untuk memperkuat posisi umat dalam menghadapi dominasi kolonial (Kosasih, 2013; Rahmadi, 1990).

Konteks kolonial Hindia Belanda turut memengaruhi dinamika pergerakan NU. Setelah berakhirnya sistem tanam paksa (1830–1870), kritik dari tokoh-tokoh Eropa seperti Van Hoeffell dan Van Deventer melahirkan politik etis yang membuka akses pendidikan bagi pribumi (Daliman, 2012; Kusmayadi, 2017). Kebijakan ini melahirkan golongan terpelajar yang menjadi motor pergerakan nasional. Namun, NU hadir dengan strategi berbeda: menggabungkan perjuangan keagamaan, sosial, dan politik melalui basis pesantren dan fatwa ulama. Dengan demikian, NU tidak hanya memperkuat identitas religius, tetapi juga ikut membangun kesadaran nasional di kalangan umat Islam (Hefner, 2000).

Dalam konteks regional, Lampung menjadi salah satu kawasan penting ekspansi dakwah NU sejak 1930-an, seiring meningkatnya arus kolonisasi Jawa ke wilayah ini. Migrasi tersebut membawa jaringan kiai dan santri yang berafiliasi dengan NU, sehingga Lampung berkembang sebagai basis baru penyebaran tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah* di luar Jawa (De Locomotief, 1939; Colombijn, 2003). Kehadiran NU di Lampung menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya berakar di pusat-pusat Jawa, tetapi juga mampu menjangkau daerah frontier kolonial yang sedang berkembang, dengan memanfaatkan momentum

mobilitas penduduk untuk membangun basis sosial-keagamaan sekaligus memperkuat identitas kebangsaan (Elson, 1997).

Kajian terdahulu mengenai NU umumnya menitikberatkan pada dimensi keagamaan internal seperti tradisi pesantren, fatwa ulama, dan praktik dakwah, sementara peran NU dalam arena sosial-politik pada masa pergerakan nasional relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, kontribusi NU dalam bidang politik, pendidikan, pers, dan ekspansi regional seperti Lampung menunjukkan bagaimana organisasi keagamaan tradisional mampu bertransformasi menjadi kekuatan sosial-politik yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam peran NU sebagai kekuatan sosial-politik pada masa pergerakan nasional di Hindia Belanda, dengan menekankan kontribusinya di bidang politik, pendidikan, pers, serta strategi non-konfrontatif. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya historiografi pergerakan nasional Indonesia dengan menyoroti aktor Islam tradisional yang turut membentuk kesadaran kebangsaan.

Artikel ini menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana strategi non-konfrontatif NU lewat koalisi antar-ormas, advokasi regulatif, dan ekspansi kelembagaan membentuk modal sosial-politik umat dalam konteks kolonial Belanda. Secara khusus juga, penelitian ini menambahkan dimensi regional Lampung sebagai laboratorium ekspansi NU pra-kemerdekaan di luar Jawa yang masih minim disentuh dalam historiografi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun sumber primer berupa arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional RI, Dinas Kearsipan Provinsi Lampung, serta koleksi digital seperti *Delpher.nl* dan *KITLV*. Dokumen dari PWNU Lampung, Museum Pers Nasional, dan Museum NU juga dimanfaatkan untuk memperkuat data. Sumber sekunder berupa buku, surat kabar sezaman, dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pelengkap. Tahap kritik meliputi kritik ekstern untuk menilai keaslian dan otentisitas sumber, serta kritik intern untuk menilai isi dan kredibilitas informasi. Hasil sumber yang telah diuji kemudian diinterpretasikan guna menjelaskan peran NU dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan pers pada masa pergerakan nasional. Tahap akhir berupa historiografi, yaitu penulisan narasi sejarah secara sistematis, kronologis, dan analitis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekonstruksi yang objektif dan ilmiah mengenai kiprah NU sebagai kekuatan sosial-politik pada masa pergerakan nasional di Hindia Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial-Politik Indonesia Menjelang Kemunculan Nahdlatul Ulama

Awal abad ke-20 merupakan fase penting perubahan sosial-politik di Hindia Belanda. Kebijakan Politik Etis membuka akses pendidikan bagi pribumi dan melahirkan kelompok terpelajar yang kemudian mendirikan organisasi pergerakan nasional dengan berbagai orientasi, mulai dari keagamaan hingga politik. Munculnya organisasi seperti Budi Utomo

dan Sarekat Islam menunjukkan bagaimana pendidikan modern berperan sebagai katalis bagi kesadaran kebangsaan yang semakin meluas.

Dalam konteks keislaman, pengaruh pembaruan dari Timur Tengah melahirkan gerakan modernis yang diwakili Muhammadiyah (1912) dan Sarekat Islam, dengan agenda purifikasi serta adaptasi terhadap modernitas. Gerakan ini memberi warna baru dalam praktik keagamaan, tetapi sekaligus menimbulkan kekhawatiran kalangan ulama tradisional. Pesantren yang berakar pada tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah* melihat perlunya kekuatan yang dapat menjaga nilai-nilai keislaman lokal di tengah arus reformisme tersebut.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan diskriminatif Belanda semakin meneguhkan kebutuhan akan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan umat sekaligus memperkuat identitas nasional. Organisasi keagamaan yang muncul pada dekade ini membuktikan adanya aspirasi kolektif untuk mencari wadah yang dapat memadukan kepentingan sosial-keagamaan dan politik (Hefner, 2000). Namun, sebelum NU berdiri, masyarakat Muslim meskipun memiliki tradisi pesantren dan tarekat yang kuat, belum memiliki organisasi formal berskala nasional yang merepresentasikan aspirasi umat Islam tradisional.

Nahdlatul Ulama kemudian lahir pada 1926 di Surabaya sebagai respons atas kebutuhan tersebut. Didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama jaringan ulama, NU tampil sebagai organisasi yang berkomitmen melestarikan tradisi keislaman lokal, sekaligus menjawab tantangan kolonialisme dan modernisasi. Karakter konservatifnya bukan berarti pasif, melainkan menjadi strategi mempertahankan identitas keislaman yang berakar pada budaya Nusantara, sembari tetap terlibat dalam dinamika nasionalisme yang berkembang pesat (Effendy, 2003).

Latar Belakang dan Proses Kelahiran Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) resmi berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya, diprakarsai KH. Hasyim Asy'ari dengan dukungan jaringan kiai dan santri. Lahirnya NU merupakan respons terhadap penetrasi ideologi Wahabi pasca-penaklukan Hijaz oleh Saudi serta minimnya representasi ulama tradisional dalam forum-forum Islam internasional yang lebih didominasi kelompok modernis (Nasrullah dan Achruh, 2023). NU menjadi wadah untuk menjaga tradisi keislaman lokal sekaligus memperkuat identitas kebangsaan.

Nahdlatoeel Oelama.

Oprichtingsvergadering te Batavia.

De voorzitter van het hoofdbestuur van de in Oost-Java vooral bekende islamietische vereeniging Nahdlatoeel Oelama, Kijai Abdul Wahab, bevindt zich momenteel te Batavia om afdeelingen dier vereeniging hier ter stede en omstreken op te richten.

Gisteren, Zondag, heeft een oprichtingsvergadering plaatsgehad, in een leeg perceel op Kramat waar eenige dagen geleden het P. S. I. congres werd gehouden. De belangstelling bleek groot te zijn, vooral van Arabische zijde.

Om negen uur werd de vergadering met een gebed geopend. Kijai Abdul Wahab zette daarna breedvoerig het doel en streven van Nahdlatoeel Oelama uiteen, hierop neerkomende, dat in de laatste jaren de Islam hier te lande achteruit is gegaan, omdat eenige zich noemende Islamietische leiders opzettelijk de ware Islam verdoezeld hadden en hun volgelingen opzettelijk op een dwaalspoor brachten ter wille van zichzelf. De Nahdlatoeel Oelama is een vereeniging van oelama's (wijzen) en van hen, die den Islam willen hooghouden. 800 Oelama's zijn bereids als lid toegetreden benevens eenige duizenden Islamieten. Afdeelingen van Banoewangi tot en met Menes zijn reeds tot stand gekomen.

Sajid Salim bin Djandan kreeg daarna het woord en sprak over de vijanden van den Islam en verkeerde gebruiken van de Islamieten in dezen tijd. Spreker uitte zijn dankbaarheid jegens de Nederlandsch-Indische Regeering, die vrijheid verleent aan allen voor het belijden van iederen godadienst.

Vervolgens voerden afgevaardigden van Menes, Kijai Hazim van Tasikmalaja en de voorzitter van de opgerichte afdeeling Batavia, Hadji Mansoer, het woord.

De bekende Sajid Ali Alhabaji van Kwitang hield daarna een redevoering, die veel indruk maakte. Aan het slot van zijn rede verklaarde hij van dien dag lid te zijn van de Nahdlatoeel Oelama. Deze mededeeling werd met applaus ontvangen.

Bij eenen sloot daarna de voorzitter de vergadering, onder mededeeling dat het aanstaande congres van Nahdlatoeel Oelama te Batavia zal worden gehouden en wel in de maand Moeharam (Mei).

Sumber: "Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië". Batavia, 20-03-1933, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 20-09-2025, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010229751:mpeg21:p006>

Perkembangan NU cukup pesat. Arsip *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* (20 Maret 1933) mencatat KH. Abdul Wahab Hasbullah hadir di Batavia untuk mendirikan cabang baru. Laporan tersebut menggambarkan antusiasme besar umat Islam, termasuk kalangan Arab, serta menegaskan tujuan NU menjaga “Islam yang sejati” di tengah kemunduran akibat kepentingan politik kelompok tertentu. Bahkan, disebutkan bahwa saat itu sudah ada 800 ulama dan ribuan anggota biasa yang terhimpun, dengan cabang-cabang dari Banyuwangi hingga Menes.

Fondasi NU tidak terlepas dari embrio tiga gerakan sebelumnya: *Nahdlatul Tujjar* (1918) yang bergerak di bidang ekonomi pedesaan, *Taswirul Afkar* (1922) yang menekankan wacana intelektual, dan *Nahdlatul Wathan* (1924) yang berorientasi pada politik dan pendidikan (Nasrullah dan Achruh, 2023). Ketiga gerakan ini menjadi basis ideologis NU dengan pilar ekonomi kerakyatan, keilmuan, dan kebangsaan. Arsip kolonial menegaskan kiprah tersebut, misalnya laporan *De Indische Courant* (3 Desember 1940) tentang rencana Kongres ke-15 NU di Surabaya yang melibatkan perempuan, pemuda, serta majelis ulama, menandakan struktur organisasi yang semakin mapan.

De Nahdlatoel Oelama, een der grootste Islamietische vereenigingen h.t.j., zal, zooals wij eerder gemeld hebben, van 9 t/m 15 December a.s. haar 15de Jaarvergadering te Soerabaia houden. Alle afdeelingen zullen daarbij vertegenwoordigd zijn. Maandag 9 December a.s. begint het congres met een receptie in het Stadstui-gebouw. Daarna zullen verschillende vergaderingen plaats hebben, o.a. van de vrouwenafdeeling, de jeugdorganisatie, de raad van oelama's en de uitvoerende raad van genoemde Vereeniging (De Indische Courant, 3 Desember 1940).

Terjemah:

“Nahdlatoel Oelama, salah satu perkumpulan Islam terbesar pada masa itu, sebagaimana telah kami beritakan sebelumnya, dari tanggal 9 sampai 15 Desember mendatang akan menyelenggarakan rapat tahunan ke-15 di Surabaya. Semua afdeling (cabang) akan diwakili dalam acara tersebut. Pada hari Senin, 9 Desember mendatang, kongres akan dibuka dengan sebuah resepsi di gedung Stadstui. Setelah itu, akan diadakan berbagai rapat, antara lain dari bagian perempuan, organisasi pemuda, dewan ulama, serta dewan eksekutif dari perkumpulan tersebut.”

Selain konsolidasi internal, NU juga aktif menyikapi isu-isu sosial politik. Dalam arsip *De Indische Courant* (5 Oktober 1941), dilaporkan konferensi cabang Pandeglang yang membahas isu milisi pribumi. Hal ini menunjukkan sikap NU yang menolak segala bentuk radikalisme bersenjata yang mengatasnamakan Islam, sejalan dengan prinsip Islam *rahmatan lil-'alamin* (Adnan, 2016). Perhatian NU pun meluas ke isu global, misalnya dukungan terhadap Palestina. *Soerabaijasch Handelsblad* (3 September 1937) mencatat keterlibatan NU dalam Komite Palestina yang membahas pentingnya Palestina bagi dunia Islam.

Dengan demikian, proses kelahiran NU berakar pada dinamika lokal maupun global. NU hadir bukan hanya sebagai organisasi keagamaan yang mempertahankan tradisi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial politik yang adaptif terhadap isu kolonialisme, modernisme, dan geopolitik Islam. Karakter inilah yang menjadikan NU mampu memainkan peran strategis dalam pergerakan nasional dan tetap relevan hingga era kemerdekaan.

Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Arena Sosial-Politik Masa Pergerakan

Sejak awal 1930-an, NU aktif di forum lintas-ormas Islam untuk menyikapi kolonialisme. Keterlibatan dalam Kongres Al-Islam di Surabaya menegaskan pola koalisi NU bersama Muhammadiyah, *Taswirul Afkar*, dan *Tarbiat-ul Islam* “hampir semua perkumpulan berlandaskan Islam telah bergabung” (*Algemeen Handelsblad*, 28-07-1931). Garis ini selaras dengan karakter NU sebagai organisasi tradisional yang terbuka bermusyawarah lintas basis. Di internal, muktamar tahunan menjadi arena permusyawaratan masalah umat; fokusnya terutama keagamaan dan kemaslahatan, mencerminkan ketegangan modernis–tradisionalis yang dikelola melalui mekanisme organisasi (van Bruinessen, 1994; As’ad, 2020). Arsip *Het Nieuws van den Dag* (20-03-1933) memperlihatkan corak akomodatif-kritis NU, pidato Sajid Salim bin Djandan mengingatkan bahaya “musuh-musuh Islam” dan praktik keliru, sembari mengapresiasi kebebasan beragama yang diakui pemerintah.

“Sajid Salim bin Djandan kreeg daarna het woord en sprak over de vyanden van den Islam en verkeerde gebruiken van de Islamieten in dezen tijd. Spreker uitte zyn dankbaarheid jegens de Nederlandsch-Indische Regeering, die vryheid verleent aan allen voor het beiyden van iederen godsdienst.” (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 20 Maret 1933).

Terjemah:

“Setelah itu, Sajid Salim bin Djandan mendapat giliran berbicara dan ia menyinggung tentang musuh-musuh Islam serta praktik keliru yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu. Pembicara juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Hindia Belanda yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memeluk dan menjalankan setiap agama.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan strategi politik NU yang khas yakni bersikap kritis terhadap praktik umat yang menyimpang, tetapi tetap akomodatif terhadap otoritas kolonial. Dengan cara ini, NU mampu menjaga ruang gerak dakwah dan konsolidasi organisasi tanpa menimbulkan represi langsung dari pemerintah.

Pola akomodasi bergeser menjadi advokasi regulatif ketika kebijakan kolonial menyentuh inti pendidikan dan hukum Islam. Guru *Ordonnantie* (1905/1925) serta Ordonansi Sekolah Liar (1935) dinilai mengekang pendidikan Islam (Asiah & Subakti, 2024; Noer, 1987). Pada Muktamar ke-14 Magelang (1939), NU mengajukan lima mosi kepada pemerintah: mempertahankan pasal yang melindungi otoritas Islam, mencabut Guru *Ordonnantie* 1925, meninjau ketimpangan subsidi agama, mengembalikan kewenangan waris ke peradilan agama, dan menindak penodaan terhadap Islam serta perhatian pada praktik pemakaman lintas agama (*De Locomotief*, 08-07-1939). Ini menunjukkan kemampuan NU mengartikulasikan tuntutan melalui perangkat modern (mosi/lobi) berlandaskan otoritas syariah (Anam, 1985).

Di luar advokasi, NU membangun kapasitas sosial-ekonomi dan literasi sebagai strategi kultural. Program Roekoen Tani (penyuluhan anti-woeker/riba) dan *Islamfonds* untuk dukungan umat dan keluarga ulama diumumkan pada forum publik Surabaya (*Soerabaijasch Handelsblad*, 18-12-1940). Di lini pendidikan, perlawanan kultural ditanamkan melalui

sekolah/pesantren; pemerintah bahkan melarang sebagian buku pegangan karena dianggap radikal (Feillard, 1999). Garis pendidikan NU menekankan pengajaran agama dan nilai kebangsaan untuk membangun kesadaran anti-kolonial (Perdana & Pratama, 2022).

Kaderisasi digerakkan melalui Gerakan Pemuda Ansor sebagai garda terdepan pembela prinsip organisasi, statusnya ditegaskan dalam muktamar (De Locomotief, 08-07-1939; *De Indische Courant*, 16-04-1941). Signifikansi Ansor terbaca dari respons negara kolonial: penangkapan 11 anggota Ansor dan pengurus NU Ciamis (*Soerabaijasch Handelsblad*, 08-10-1941) memicu interpelasi di *Volksraad* dengan sepuluh pertanyaan mengenai legalitas, prosedur, hingga sensitivitas sosial selama bulan puasa (*De Sumatra Post*, 15-11-1941). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa isu NU/Ansor telah bergerak dari sektoral keagamaan menjadi urusan relasi negara-masyarakat yang lebih luas.

Konsistensi NU membangun politik koalisi berlanjut dalam wadah MIAI (1937), yang berupaya memengaruhi kebijakan politik keagamaan, dan dukungan terhadap seruan GAPI agar “Indonesia berparlemen” membawa unsur pemuda NU ke panggung politik kebangsaan (Anam, 1985; Haris, 2012). Dengan kombinasi koalisi, advokasi regulatif, pemberdayaan sosial-ekonomi, pendidikan, serta kaderisasi, NU memosisikan diri sebagai kekuatan sosial-politik yang efektif di bawah rezim kolonial tanpa memilih jalur konfrontasi massa, sebuah politik kultural-institusional yang menjadi modal memasuki era kemerdekaan.

Strategi Kultural NU sebagai Perlawanan Non-Konfrontatif

Berbeda dari organisasi pergerakan yang mengusung strategi konfrontatif, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Sarekat Islam Merah, Nahdlatul Ulama (NU) lebih memilih jalur kultural dan moral dalam melawan hegemoni kolonial. Perlawanan non-konfrontatif ini diejawantahkan melalui konsolidasi pesantren, dakwah berbasis majelis taklim, pengajian kitab dan kesenian religius, pengembangan pendidikan non-formal, serta penguatan solidaritas sosial. Strategi ini memungkinkan NU membangun kesadaran kolektif umat Islam tanpa harus berhadap-hadapan langsung dengan aparat kolonial, sekaligus menanamkan nilai-nilai kemandirian dan martabat bangsa.

Pesantren menjadi basis utama konsolidasi NU. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren juga berperan sebagai pusat koordinasi ulama dan ruang pertemuan jaringan organisasi. K.H. Hasyim Asy’ari, misalnya, tercatat membina lebih dari 1.500 santri di Tebuireng, Jombang (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 23-09-1941). Pesantren Tebuireng bahkan menjadi lokasi penting konferensi NU yang dihadiri sekitar 100 kiai dari 20 daerah sekitar, menjadikannya pusat konsolidasi keagamaan dan sosial (*De Locomotief*, 16-06-1939). Kehadiran K.H. Abdul Wahid Hasyim, putra Hasyim Asy’ari, memperkuat posisi Tebuireng sebagai simpul strategis NU, menandai kesinambungan tradisi pesantren dan kepemimpinan ulama.

Dakwah massal menjadi instrumen kultural lain yang sangat efektif. NU mengadakan majelis taklim, tablig akbar, dan pengajian kitab secara terbuka, melibatkan ribuan jamaah. *Arsip Soerabaijasch Handelsblad* (18-12-1940) mencatat pertemuan di Masjid Ampel yang dihadiri lebih dari 5.000 jamaah laki-laki, sementara forum khusus perempuan berlangsung

di Taman Kota Surabaya. Pertemuan ini membahas persoalan sosial-keagamaan sekaligus menguatkan solidaritas umat. Selain itu, pertemuan terbuka di Lapangan Lanesan (*De Indische Courant*, 16-04-1941) menegaskan resolusi kongres NU terkait ibadah, wakaf masjid dan langgar, hingga prosedur talak. Kegiatan semacam ini memperlihatkan bagaimana dakwah NU tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga menyampaikan pesan moral universal seperti amal, solidaritas, dan optimisme sosial.

Strategi non-konfrontatif NU juga tampak pada pengembangan pendidikan non-formal. NU menaruh perhatian besar terhadap pemberantasan buta huruf melalui kursus permanen dan kunjungan rumah (*De Indische Courant*, 16-04-1941). Inovasi ini memungkinkan literasi agama dan pengetahuan dasar menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terakses sekolah kolonial. Di samping itu, aktivitas sosial-kultural juga menjadi wahana membangun solidaritas kolektif. Dana sosial untuk pemakaman mencerminkan nilai tolong-menolong sebagai bagian integral dari ajaran Islam (*De Indische Courant*, 16-04-1941). Pada forum yang sama, dilaporkan pula khitanan massal bagi 178 anak lengkap dengan pemberian pakaian, menandai bagaimana ritual keagamaan dipadukan dengan kepedulian sosial.

Dengan strategi-strategi tersebut, NU berhasil menanamkan kesadaran bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak harus diwujudkan melalui konfrontasi fisik, melainkan dapat dijalankan lewat jalur kultural, pendidikan, dan solidaritas sosial. Cara ini tidak hanya menjaga keberlangsungan organisasi di bawah tekanan kolonial, tetapi juga membangun basis masyarakat Muslim yang berdaya, mandiri, dan siap menghadapi tantangan kemerdekaan.

Peran Nahdlatul Ulama di Lampung Menjelang Kemerdekaan

Kiprah NU di Lampung mulai tampak pada dekade 1930-an, seiring menguatnya arus kolonisasi penduduk Jawa ke distrik-distrik Lampung. Momentum demografis ini dibaca NU sebagai “jendela dakwah” untuk memperluas basis sosial ke kawasan luar Jawa. Dokumen kongres NU tahun 1939 sebagaimana dilaporkan *De Locomotief* “...Aan den top van het jaarlijksche programma staat de Javaansche kolonisatie in de Lampongdistricten, waar een intense Islam-propaganda zal worden gevoerd. Deze taak is opgedragen aan den consul van het hoofdbestuur te Palembang...”, menempatkan “kolonisasi Jawa di distrik-distrik Lampung, tempat propaganda Islam yang intens akan dijalankan” sebagai program puncak tahunan. Tugas tersebut secara eksplisit “diamanatkan kepada konsul Pengurus Besar di Palembang,” menandakan desain organisasi yang lintas-pulau dan berorientasi nasional (*De Locomotief*, 08-07-1939).

Dalam praktiknya, jaringan kiai dan santri yang bergerak mengikuti aliran migrasi membawa tradisi pesantren, ritus *Ahlussunnah wal-Jamaah*, dan semangat *Nahdliyin* ke komunitas-komunitas baru. Ekspansi ini biasanya dimulai dari pembentukan majelis taklim dan pengajian kitab, lalu berlanjut ke penguatan kelembagaan, baik berupa langgar/musala maupun kelas-kelas literasi agama. Pola tersebut memperlihatkan strategi kultural-institusional NU mengokohkan norma keagamaan, memperluas otoritas sosial kiai, dan memadatkan jejaring jamaah sebagai modal sosial umat di wilayah utama kolonisasi.

Seiring konsolidasi, kiai-kiai yang berafiliasi nilai-nilai NU di Lampung kerap berperan sebagai mediator sosial dalam sengketa lokal, penghubung komunitas migran dengan struktur administratif kolonial, serta rujukan etik dalam isu-isu keluarga dan kemasyarakatan. Di beberapa titik, embrio kelembagaan pendidikan, dari kelas mengaji dasar hingga pondok/pesantren menjadi pusat dakwah sekaligus arena pembentukan identitas keagamaan komunitas migran. Dengan cara ini, NU mengonversi kebijakan kolonial tentang mobilitas penduduk menjadi mobilitas jaringan religius yang menopang integrasi sosial dan penguatan identitas Muslim di Lampung. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Lampung menjadi laboratorium awal bagi ekspansi nasional NU, di mana peran kiai dan pesantren tidak hanya menjaga identitas keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai agen integrasi sosial bagi komunitas transmigran Jawa. Secara historiografis, kesimpulan di atas ditopang kuat oleh bukti primer *De Locomotief* (1939) tentang mandat PBNU di Palembang untuk Lampung. Pada ambang kemerdekaan, Lampung menjadi laboratorium ekspansi NU yang memadukan dakwah, pendidikan non-formal, dan kepemimpinan kiai, suatu pola khas NU dalam membangun modal sosial-politik umat di wilayah perintisan.

KESIMPULAN

Kiprah Nahdlatul Ulama (NU) dalam masa pergerakan nasional menunjukkan bahwa organisasi ini memainkan peran penting tidak hanya dalam ranah keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Melalui konsolidasi pesantren, dakwah terbuka, pendidikan non-formal, dan aktivitas sosial-kultural, NU mengembangkan strategi perlawanan non-konfrontatif yang efektif dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Strategi tersebut memungkinkan NU untuk memperkuat identitas *Ahlussunnah wal Jama'ah*, membangun kesadaran kolektif umat Islam, sekaligus menjaga eksistensi organisasi di tengah tekanan kolonial.

NU juga terbukti responsif terhadap kebijakan kolonial yang diskriminatif, dengan menyuarakan kritik melalui muktamar dan mengajukan mosi kepada pemerintah, sembari tetap menjaga sikap diplomatis. Peran NU dalam MIAI dan GAPI menunjukkan pergeseran orientasi dari fokus keagamaan menuju kontribusi lebih luas dalam perjuangan politik kebangsaan. Sementara itu, di daerah-daerah kolonisasi seperti Lampung, NU memanfaatkan arus migrasi untuk memperluas jaringan dakwah dan pendidikan, sehingga semakin menegaskan visinya sebagai organisasi berskala nasional.

Dengan demikian, NU pada masa pergerakan nasional dapat dipahami sebagai organisasi Islam tradisional yang mampu menggabungkan peran keagamaan, sosial, dan politik secara harmonis. Pendekatan non-konfrontatif yang dipilih terbukti efektif dalam menjaga kesinambungan perjuangan, memperkuat solidaritas umat, serta mempersiapkan masyarakat Muslim untuk menghadapi era kemerdekaan Indonesia.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada kajian sejarah Islam dan kolonialisme di Indonesia dengan menegaskan bahwa strategi perlawanan non-konfrontatif NU merupakan bentuk politik kultural yang khas. Temuan ini juga memperkaya perspektif historiografi pergerakan nasional, dengan menempatkan NU bukan hanya sebagai organisasi

keagamaan, tetapi juga sebagai aktor penting komunitas Islam yang berperan dalam pembentukan kesadaran kebangsaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas dukungan dan pendanaan yang diberikan dalam penelitian ini. Bantuan tersebut sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adnan, M. (2016). Nahdlatul Ulama dan negara bangsa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1–15.
- Anam, C. (1985). *Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala: Jatayu.
- As'ad, M. (2020). Mengapa Jepang memilih Hadratussyaikh: Analisa sejarah ditunjukkannya KH. Hasyim Asy'ari menjadi Ketua Masyumi. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1), 85–103.
- Asiah, N., & Subakti, G. E. (2024). Upaya Nahdlatul Ulama dalam melawan kolonialisme dan imperialisme pada masa pergerakan nasional Indonesia 1926–1942. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(2), 135–148.
- Barton, G., & Fealy, G. (1996). *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Monash Asia Institute.
- Colombijn, F. (2003). *Patches of Padang: The History of an Indonesian Town in the Twentieth Century*. Leiden: KITLV.
- Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia abad XIX–awal abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (1997). *Sejarah daerah Lampung*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Effendy, B. (2003). *Islam and political modernism in Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Elson, R. E. (1997). *The End of the Peasantry in Southeast Asia*. London: Macmillan.
- Fahrudin, F. (2009). *Agama dan pendidikan demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Feillard, A. (1999). *NU vis a vis Negara: Pencarian isi, bentuk dan makna*. Yogyakarta: LKiS.
- Haris, M. (2012). Potret partisipasi politik NU di Indonesia dalam lintasan sejarah. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 135–152.
- Hefner, R. W. (2000). *Islam, nationalism, and democracy: A Muslim movement in postcolonial Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Kosasih, A. (2013). Pers Tionghoa dan dinamika pergerakan nasional di Indonesia, 1900–1942. *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1(1), 55–68.
- Kusmayadi, Y. (2017). Sejarah perkembangan pendidikan di Priangan 1900–1942. *Jurnal Artefak*, 4(2), 89–100.
- Nasrullah, R., & Achruh, A. (2023). Nahdlatul Ulama, tokoh, dan kegiatannya dalam dunia pendidikan. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(1), 45–60.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di pentas nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2022). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia*. Klaten: Lakeisha.
- Rahmadi, F. (1990). *Perbandingan sistem pers*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200*. Stanford University Press.
- Shiraishi, T. (1990). *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926*. Cornell University Press.
- Sutarmo. (2005). *Gerakan sosial keagamaan modernis*. Yogyakarta: Suaka Alva.
- Van Bruinessen, M. (1994). *NU: Tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Vickers, A. (2013). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

Arsip dan Surat Kabar

- Algemeen Handelsblad. (1931, Juli 28). *Rondom de anti-Italiaansche boycot*. Amsterdam. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010661916:mpeg21:p003>
- Bataviaasch Nieuwsblad. (1941, September 23). *Indisch nieuws: Nahdlatoel Oelama*. Batavia. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011222019:mpeg21:p006>
- De Indische Courant. (1940, Desember 3). *Nahdlatoel Oelama: Jaarvergadering te Soerabaia*. Soerabaja. Geraadpleegd op Delpher. <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?identificer=ddd:011176389:mpeg21:a0084>
- De Indische Courant. (1941, April 16). *Conferentie "Nahdlatoel Oelama"*. Soerabaja. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011176619:mpeg21:p014>
- De Locomotief. (1939, Juli 8). *Congres Nahdlatoel Oelama. Samarang*. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:003468014:mpeg21:p00007>
- De Locomotief. (1939, Juni 16). *Ressortconferentie Nahdlatoel Oelama. Samarang*. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:003473084:mpeg21:p00016>
- De Sumatra Post. (1941, November 15). *Arrestatie van Ansor-leden: Vraag in den Volksraad*. Medan. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011177149:mpeg21:p011>
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië. (1933, Maret 20). *Nahdlatoel Oelama*. Batavia. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010229751:mpeg21:p006>
- Soerabaijasch Handelsblad. (1937, September 3). *Vergadering Palestina comité Mohammedaansche belangstelling*. Soerabaja. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011110230:mpeg21:a0105>
- Soerabaijasch Handelsblad. (1940, Desember 18). *Nahdlatoel Oelama openbare bijeenkomst*. Soerabaja. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011121533:mpeg21:p011>
- Soerabaijasch Handelsblad. (1941, Oktober 8). *Arrestatie N.O.- en Ansor-leden*. Soerabaja. Geraadpleegd op Delpher. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011122824:mpeg21:p012>